



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/581/Sekr.7/BKD

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 Juli 2022



LISENDA RRIYANA, S.Sos
Kepala Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



BKD
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH



DOKUMEN PETA PROSES BISNIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan sesuai dengan visi, misi, dan program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta sebagai penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan dokumen Proses Bisnis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .

Penyusunan dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini berpedoman kepada Sasaran Strategis Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana diharapkan dengan adanya Dokumen Proses Bisnis ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mendukung visi dan misi serta program yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian yaitu manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dibuat. Semoga dapat menjadi acuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya aparatur, serta penilaian kinerja ASN. Sehingga instansi BKD Provinsi Kalimantan Tengah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Selain itu dapat dengan mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Palangka Raya, 14 Juli 2022



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA PERIYANA, S.Sos

Pemula Utama Muda

NIP. 19680901 198911 2 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud,Tujuan dan Manfaat.....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3
A. PETA PROSES BISNIS BKD BERDASARKAN TINGKATAN.....	3
1. Peta Proses Bisnis BKD Level 0.....	3
2. Peta Proses Bisnis BKD Level 1.....	8
3. Peta Proses Bisnis BKD Level 2.....	12
4. Peta Proses Bisnis BKD Menggunakan Jenis Gambar Peta	22
BAB III PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tidak terkecuali Instansi Pemerintah Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi publik tentu saja membutuhkan suatu proses bisnis yang baik agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai acuan tiap Bidang untuk penyelenggaraan pelayanan Kepegawaian secara prima dan professional sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis antara lain agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; serta
- c. Memiliki set pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Asset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

C. Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

BAB II PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. PETA PROSES BISNIS BKD BERDASARKAN TINGKATAN

Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Hirarki proses bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

1. Peta Proses Bisnis BKD Level 0

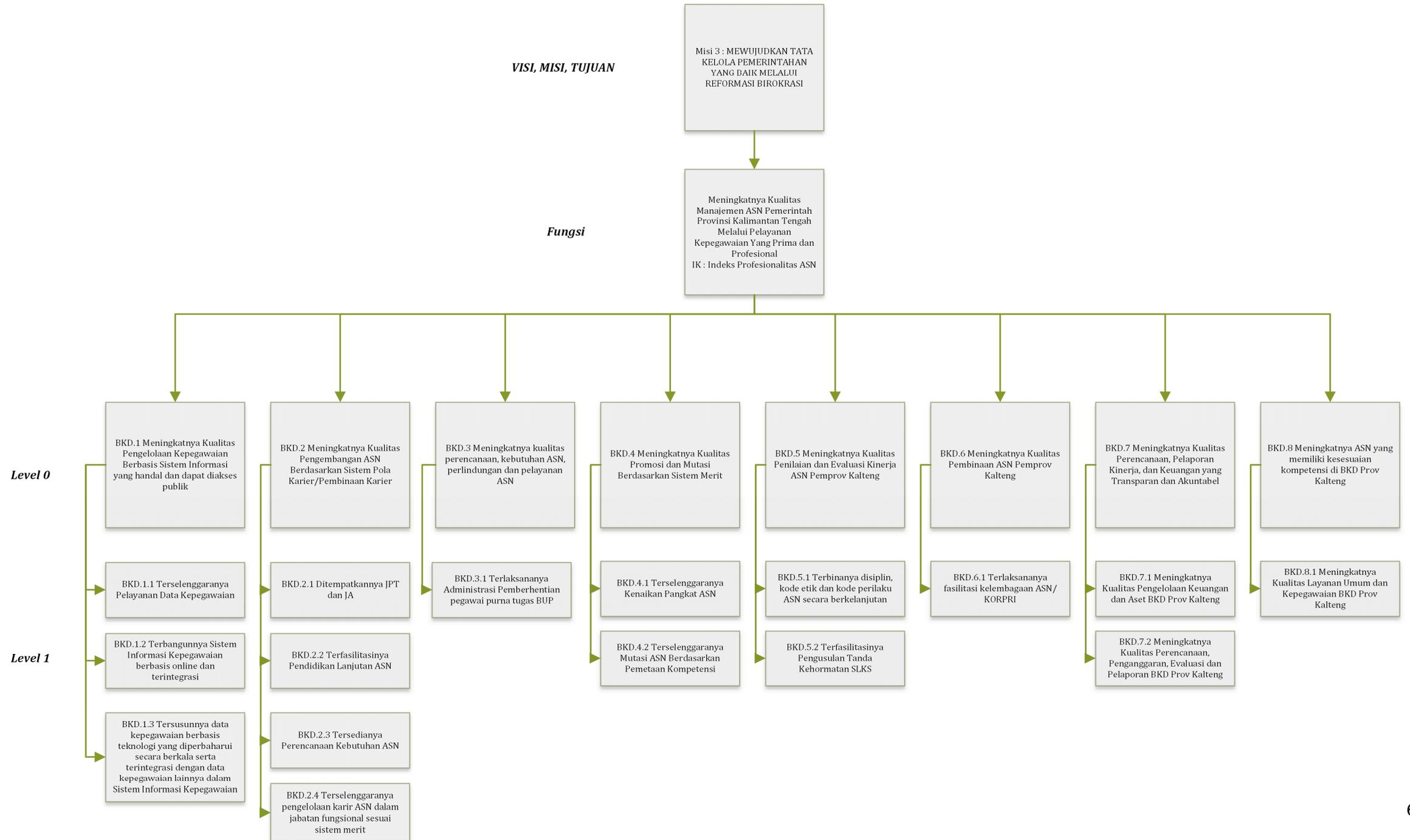
Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 BKD merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis BKD 2021-2026, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

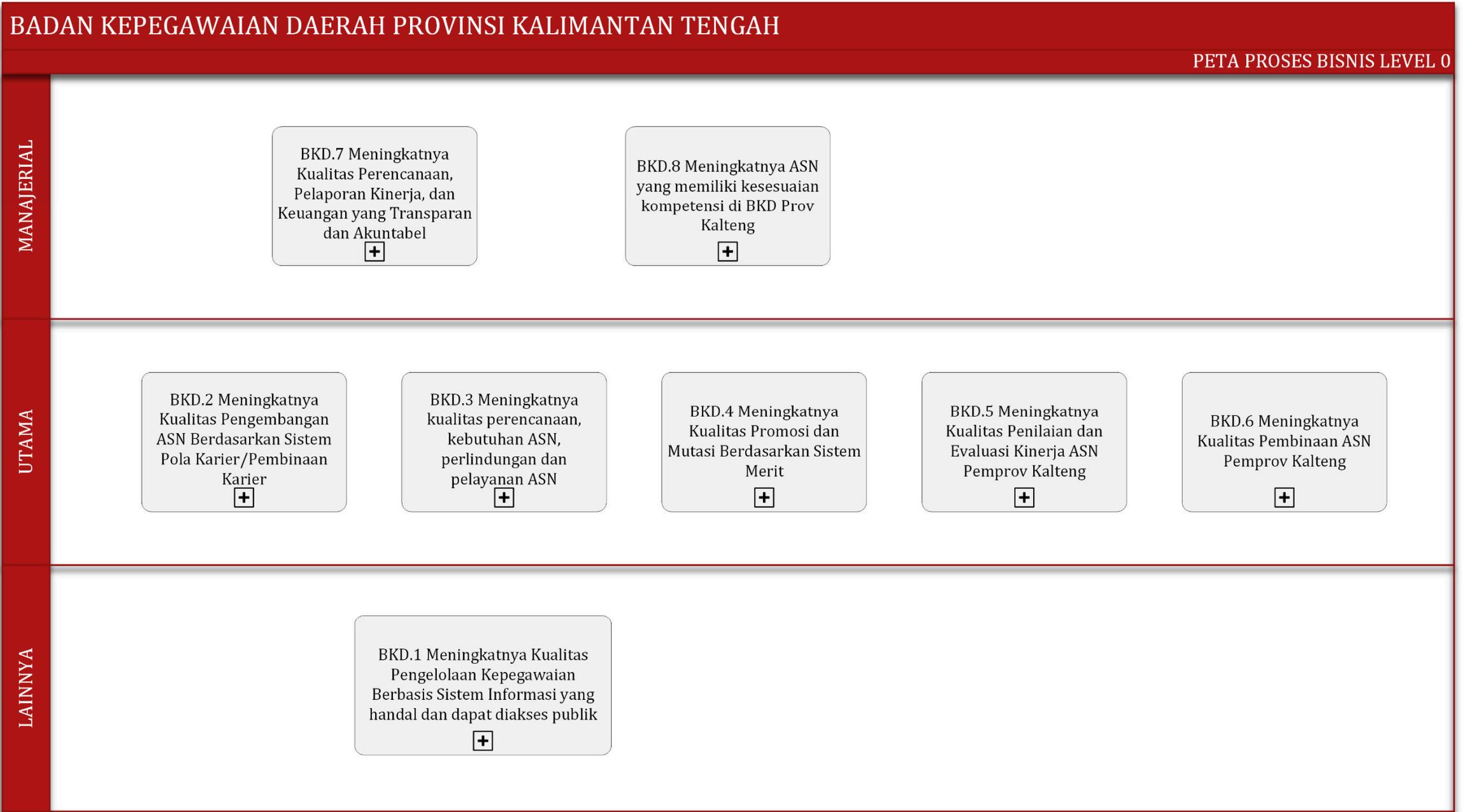
TABEL 1 PROSES DAN SUB PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS	PROSES BISNIS LEVEL 0		SUB PROSES LEVEL 1		PENANGGUNG JAWAB BIDANG
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	BKD.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi yang handal dan dapat diakses publik	BKD.1.1	Terselenggaranya Pelayanan Data Kepegawaian	PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
			BKD.1.2	Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online dan terintegrasi	PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
			BKD.1.3	Tersusunnya data kepegawaian berbasis teknologi yang diperbaharui secara berkala serta terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya dalam Sistem Informasi Kepegawaian	PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
	BKD.2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan ASN Berdasarkan Sistem Pola Karier/Pembinaan Karier	BKD.2.1	Ditematkannya JPT dan JA	PENGEMBANGAN
			BKD.2.2	Terfasilitasnya Pendidikan Lanjutan ASN	PENGEMBANGAN
			BKD.2.3	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan ASN	PENGEMBANGAN
			BKD.2.4	Terselenggaranya pengelolaan karir ASN dalam jabatan fungsional sesuai sistem merit	PENGEMBANGAN
	BKD.3	Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan ASN, perlindungan dan pelayanan ASN	BKD.3.1	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	MUTASI

SASARAN STRATEGIS	PROSES BISNIS LEVEL 0		SUB PROSES LEVEL 1		PENANGGUNG JAWAB BIDANG
	BKD.4	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi Berdasarkan Sistem Merit	BKD.4.1	Terselenggaranya Kenaikan Pangkat ASN	MUTASI
			BKD.4.2	Terselenggaranya Mutasi ASN Berdasarkan Pemetaan Kompetensi	MUTASI
	BKD.5	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN Pemprov Kalteng	BKD.5.1	Terbinanya disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN secara berkelanjutan	DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN
			BKD.5.2	Terfasilitasinya Pengusulan Tanda Kehormatan SLKS	DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN
	BKD.6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan ASN Pemprov Kalteng	BKD.6.1	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan ASN/ KORPRI	DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN
	BKD.7	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	BKD.7.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset BKD Prov Kalteng	SEKRETARIAT
			BKD.7.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan BKD Prov Kalteng	SEKRETARIAT
	BKD.8	Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di BKD Prov Kalteng	BKD.8.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian BKD Prov Kalteng	SEKRETARIAT

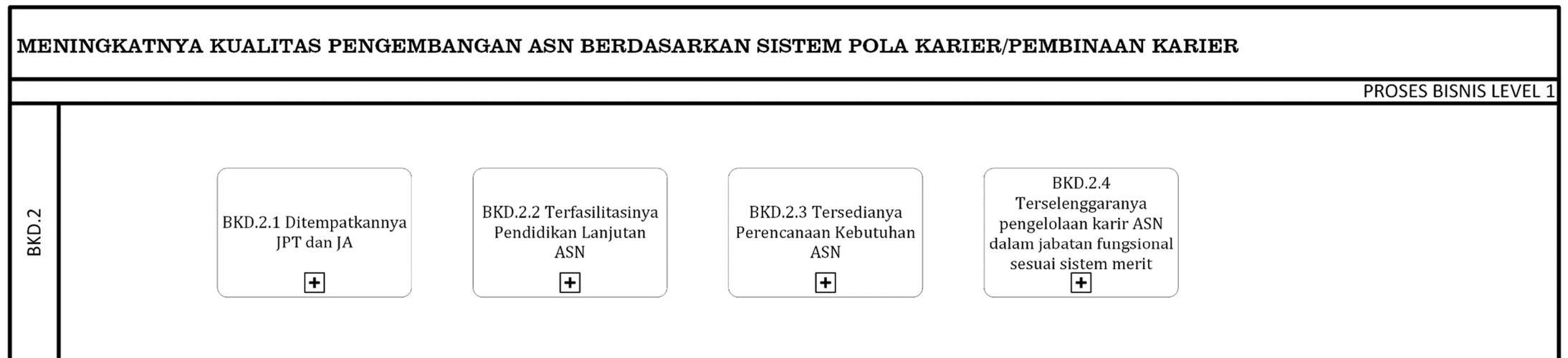
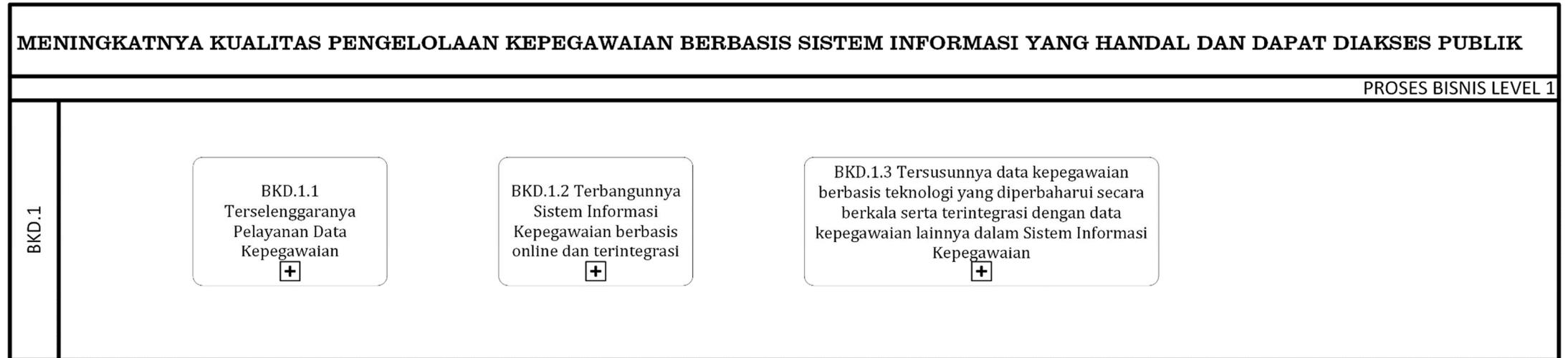
GAMBAR 1 KERANGKA PETA PROSES BISNIS BKD MENGGUNAKAN LEVEL/TINGKATAN





2. Peta Proses Bisnis BKD Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, KEBUTUHAN ASN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ASN

PROSES BISNIS LEVEL 1

BKD.3

BKD.3.1 Terlaksananya
Administrasi
Pemberhentian Pegawai
Purna Tugas BUP
+

MENINGKATNYA KUALITAS PROMOSI DAN MUTASI BERDASARKAN SISTEM MERIT

PROSES BISNIS LEVEL 1

BKD.4

BKD.4.1
Terselenggaranya
Kenaikan Pangkat ASN
+

BKD.4.2
Terselenggaranya Mutasi
ASN Berdasarkan
Pemetaan Kompetensi
+

MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ASN PEMPROV KALTENG

PROSES BISNIS LEVEL 1

BKD.5

BKD.5.1 Terbinanya
Disiplin, Kode Etik, dan
Kode Perilaku ASN
Secara Berkelanjutan



BKD.5.2 Terasilinasinya
Pengusulan Tanda
Kehormatan SLKS



MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN ASN PEMPROV KALTENG

PROSES BISNIS LEVEL 1

BKD.6

BKD.6.1 Terlaksananya
Fasilitasi Kelembagaan
ASN / KORPRI



MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA, DAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PROSES BISNIS LEVEL 1

BKD.7

BKD.7.1 Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset BKD
Prov Kalteng



BKD.7.2 Meningkatnya
Kualitas Perencanaan,
Pengggaran, Evaluasi
dan Pelaporan BKD Prov
Kalteng



MENINGKATNYA ASN YANG MEMILIKI KESESUAIAN KOMPETENSI DI BKD PROV KALTENG

PROSES BISNIS LEVEL 1

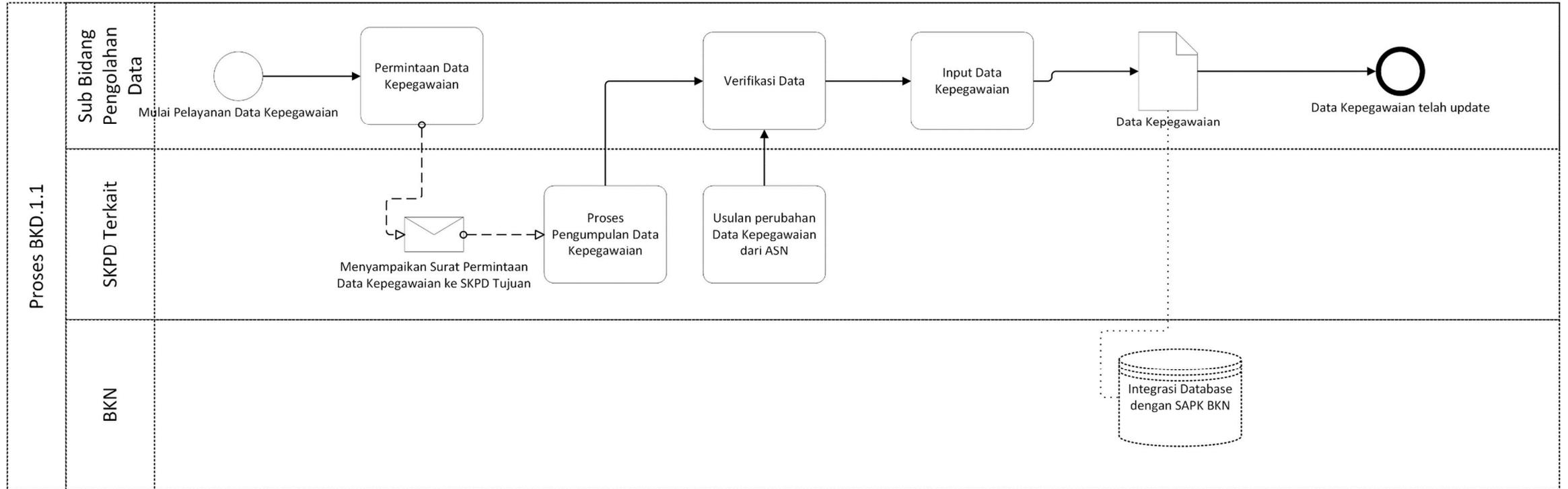
BKD.8

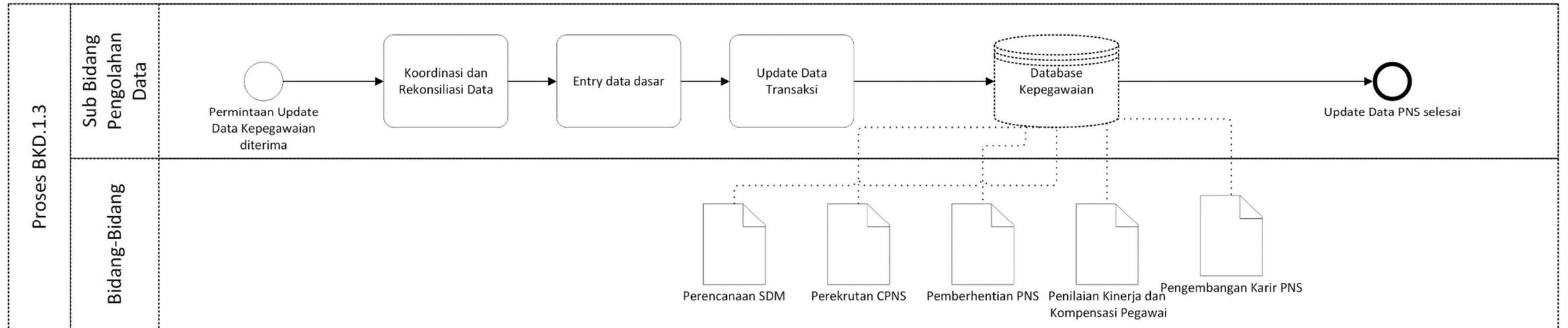
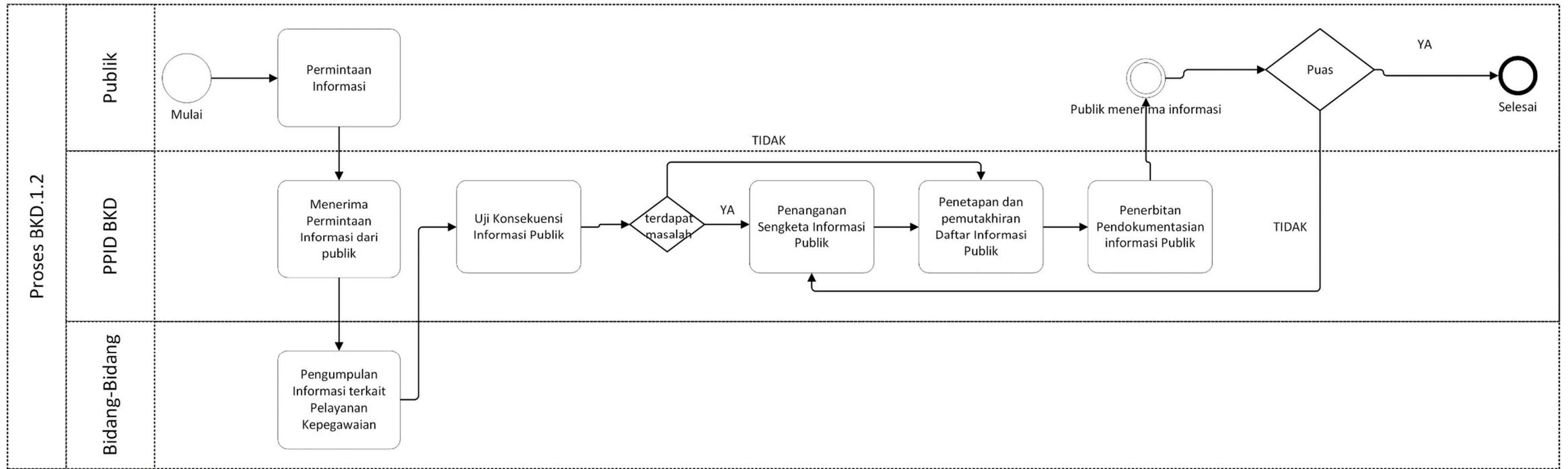
BKD.8.1 Meningkatnya
Kualitas Layanan Umum
dan Kepegawaian BKD
Prov Kalteng

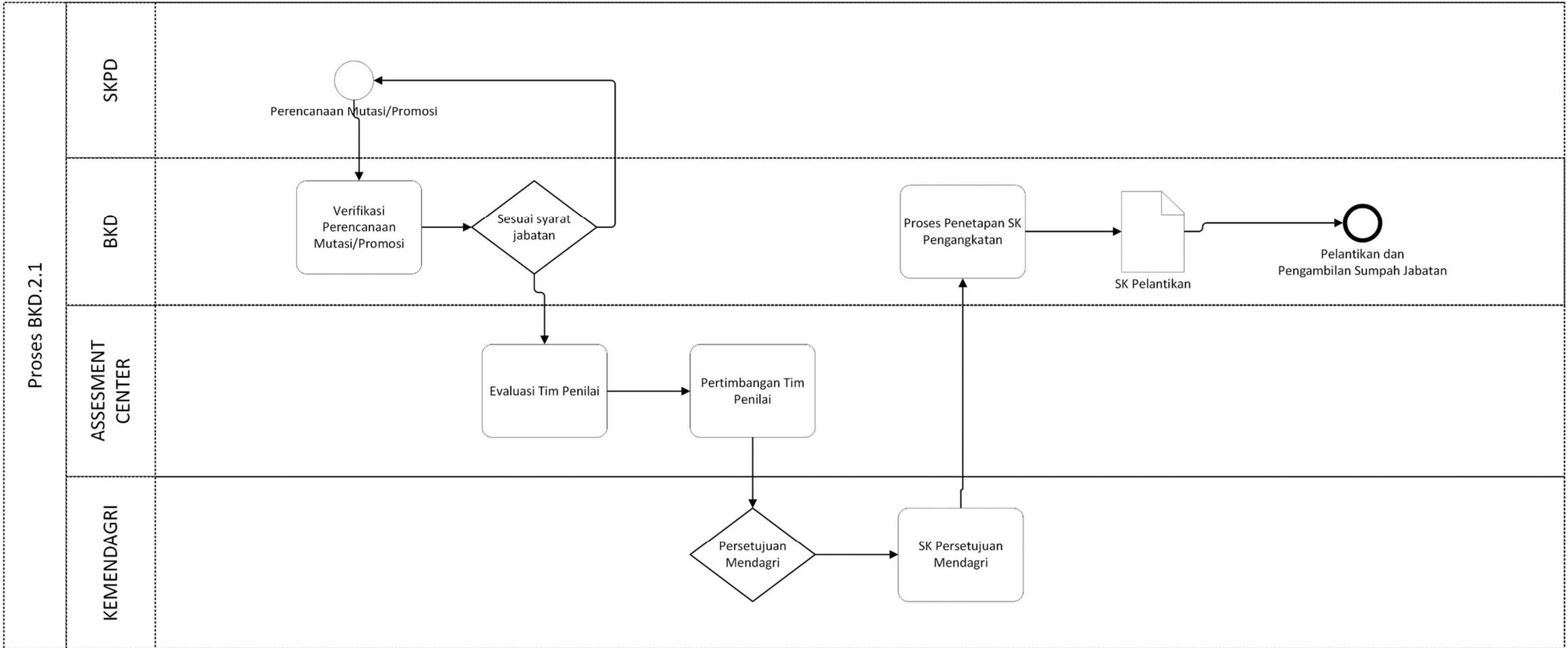


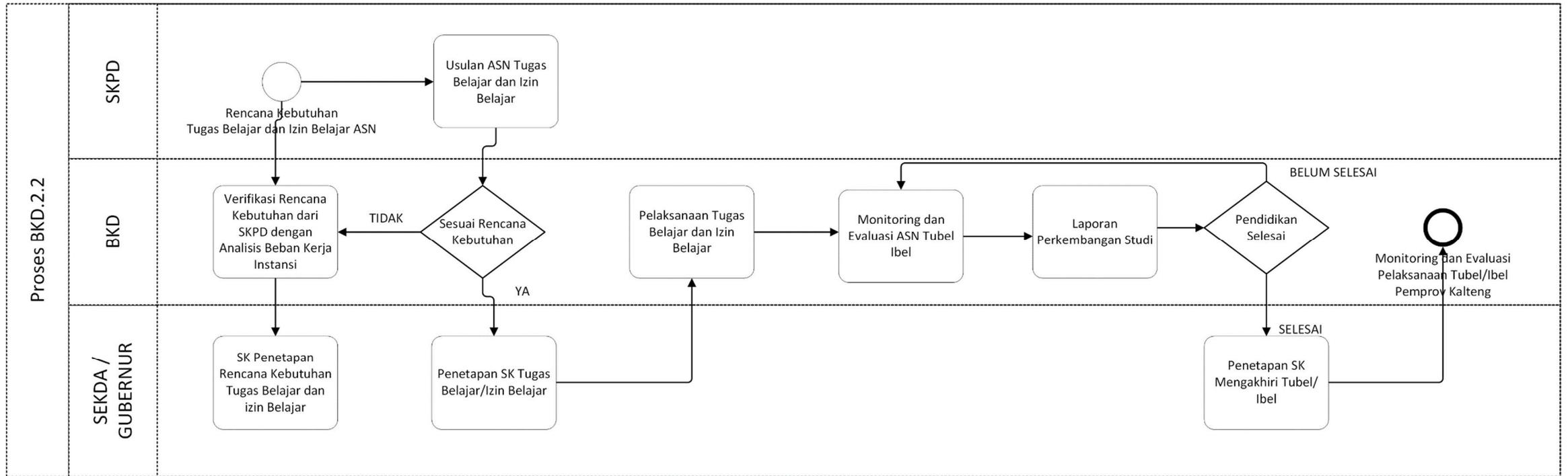
3. Peta Proses Bisnis BKD Level 2

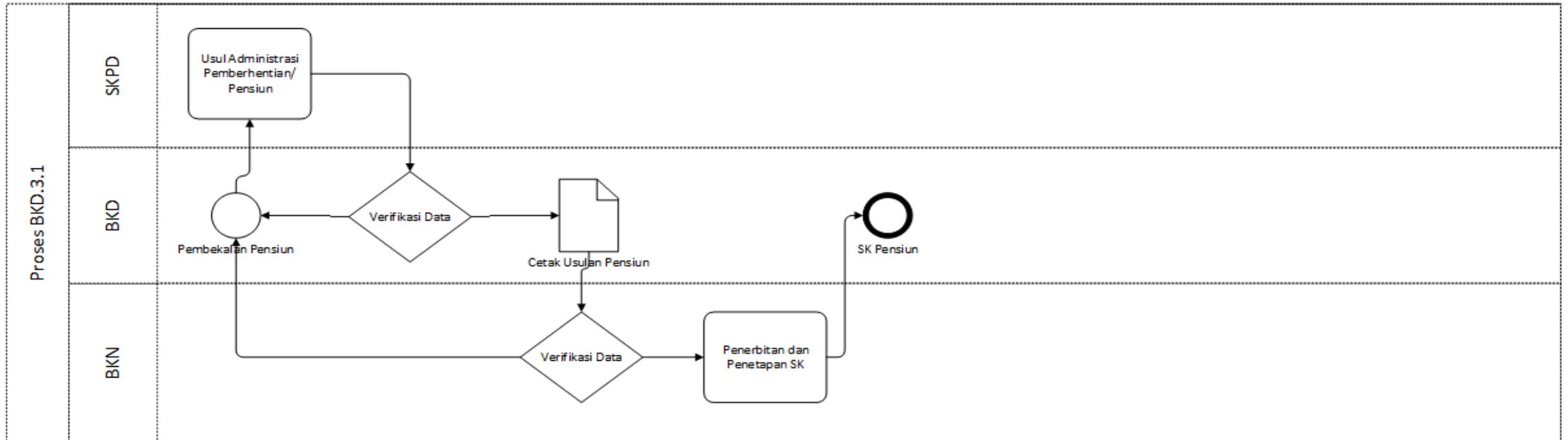
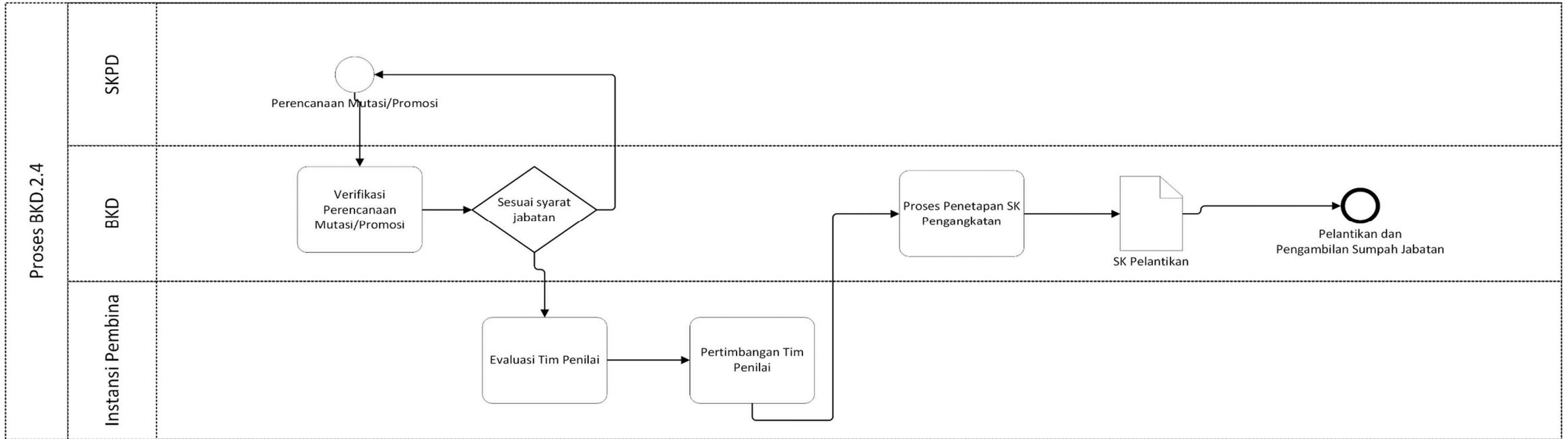
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses bisnis yang ada di level 1.

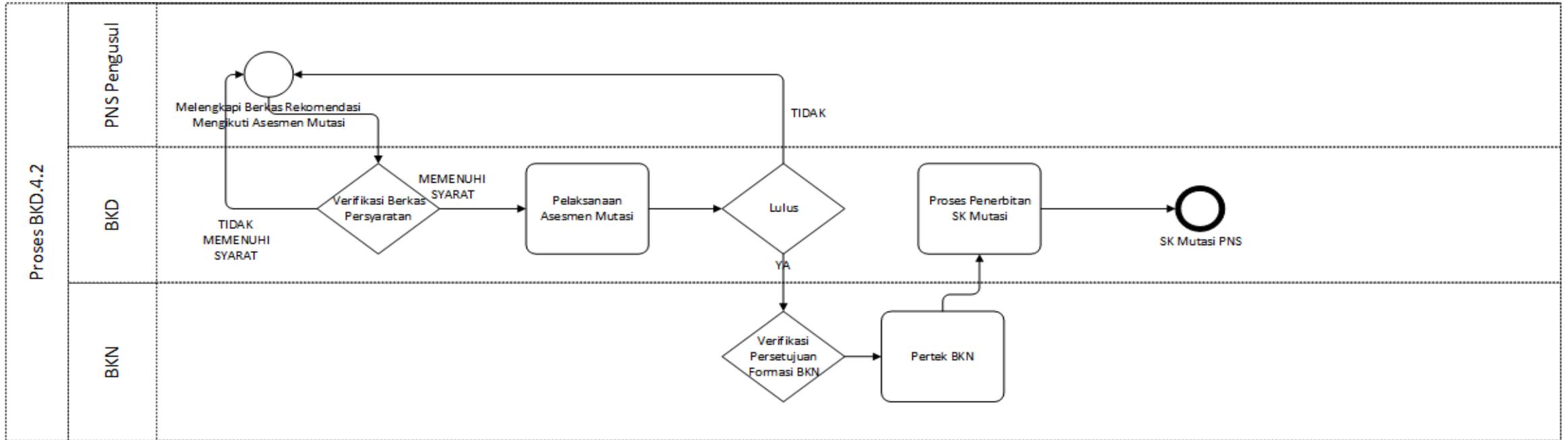
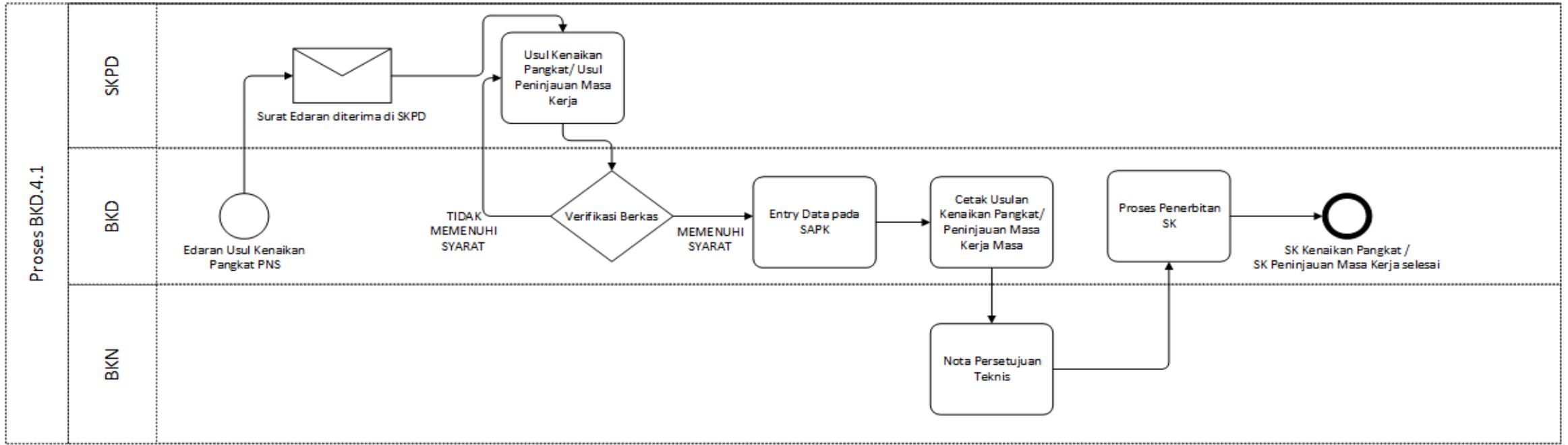


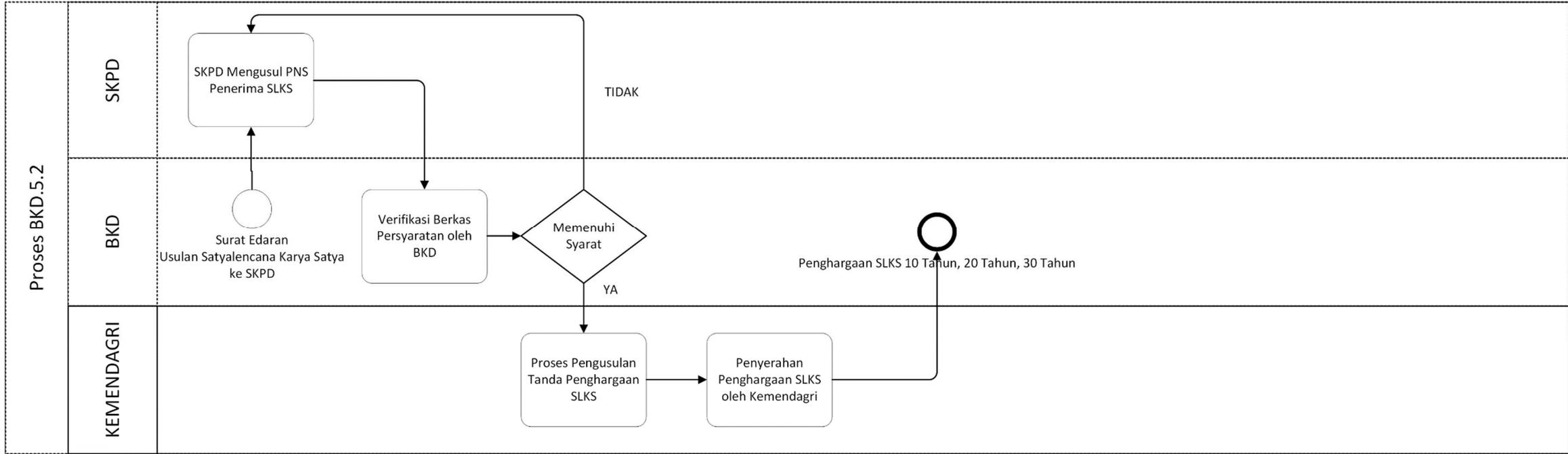
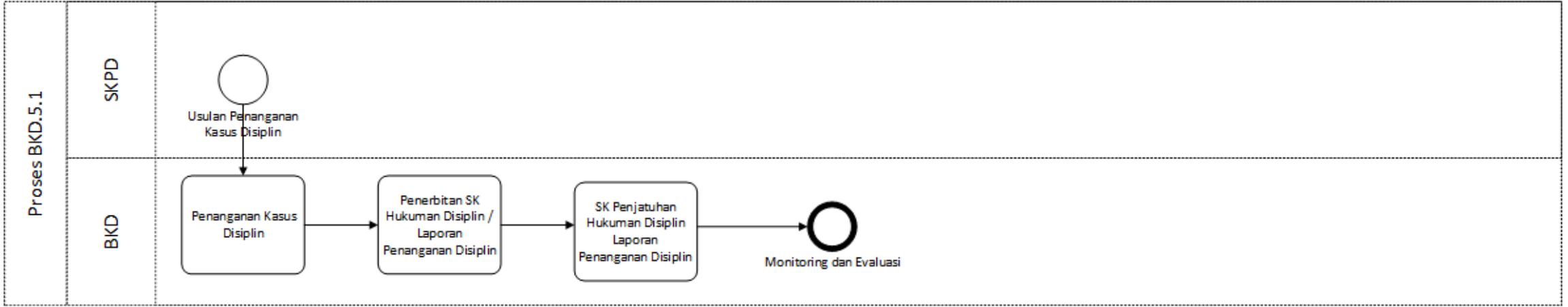


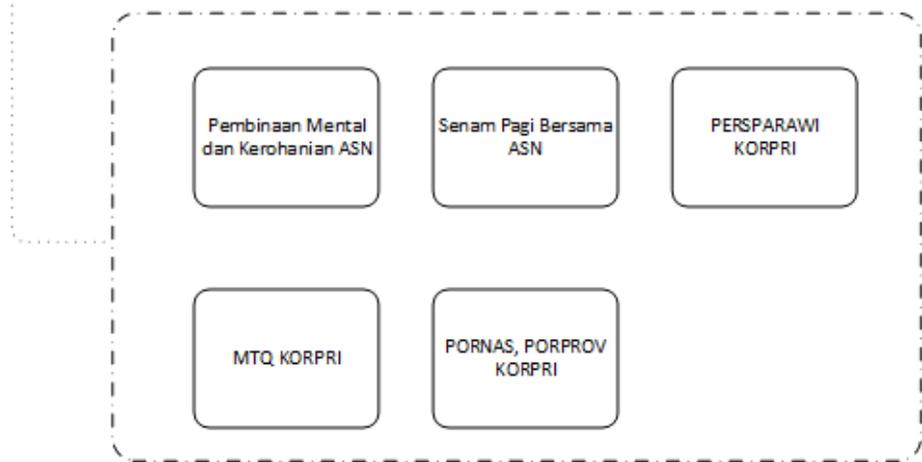
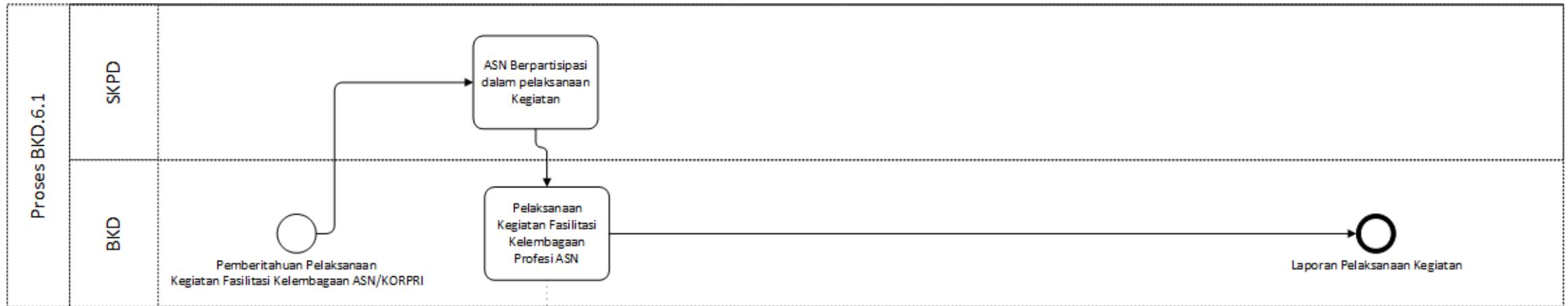


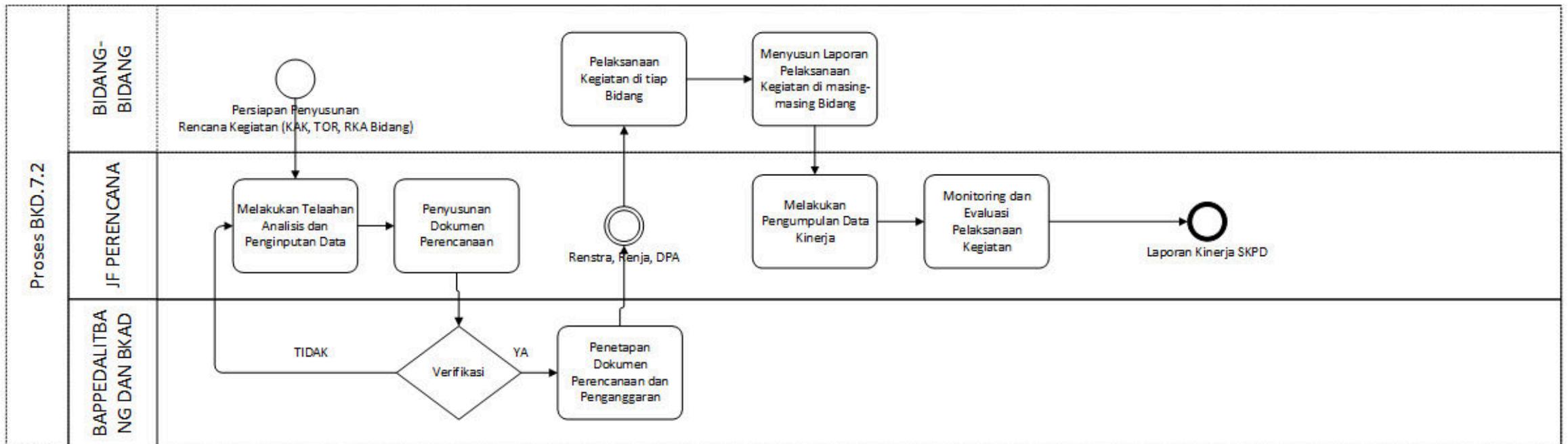
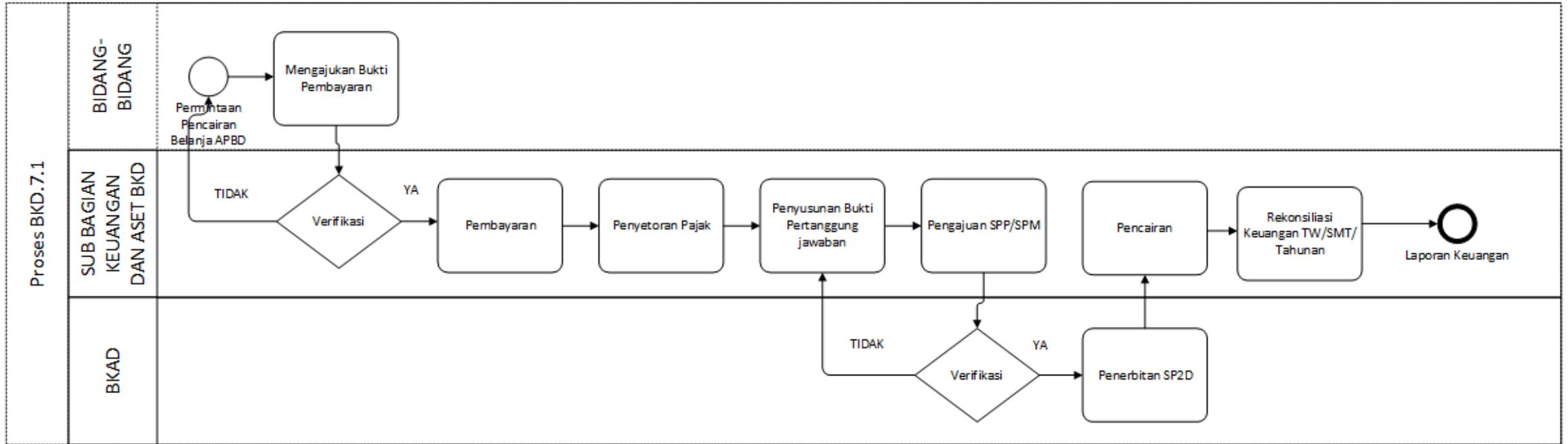


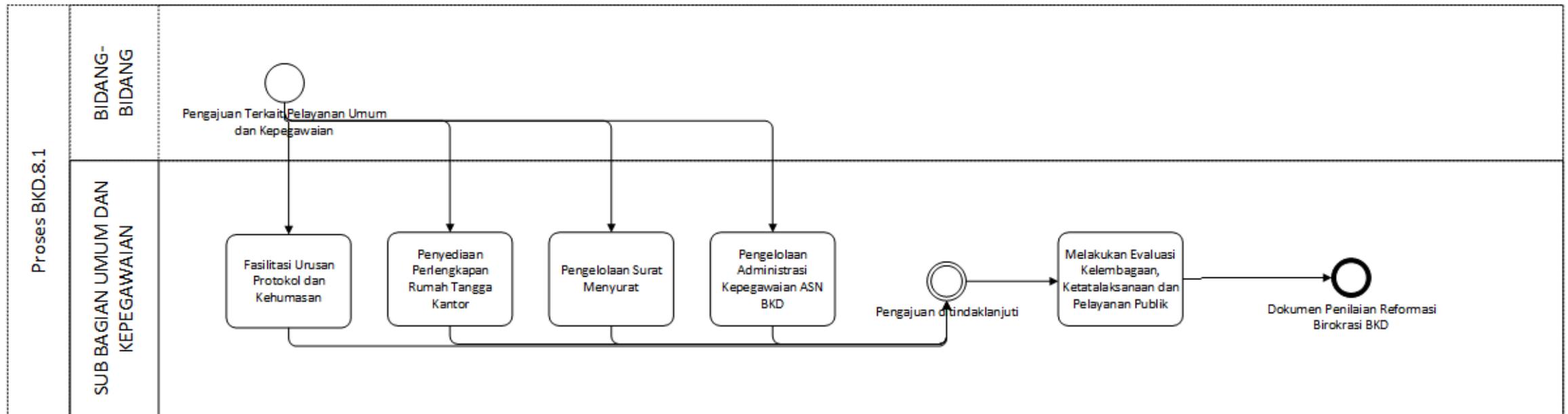












4. Peta Proses Bisnis BKD Menggunakan Jenis Gambar Peta

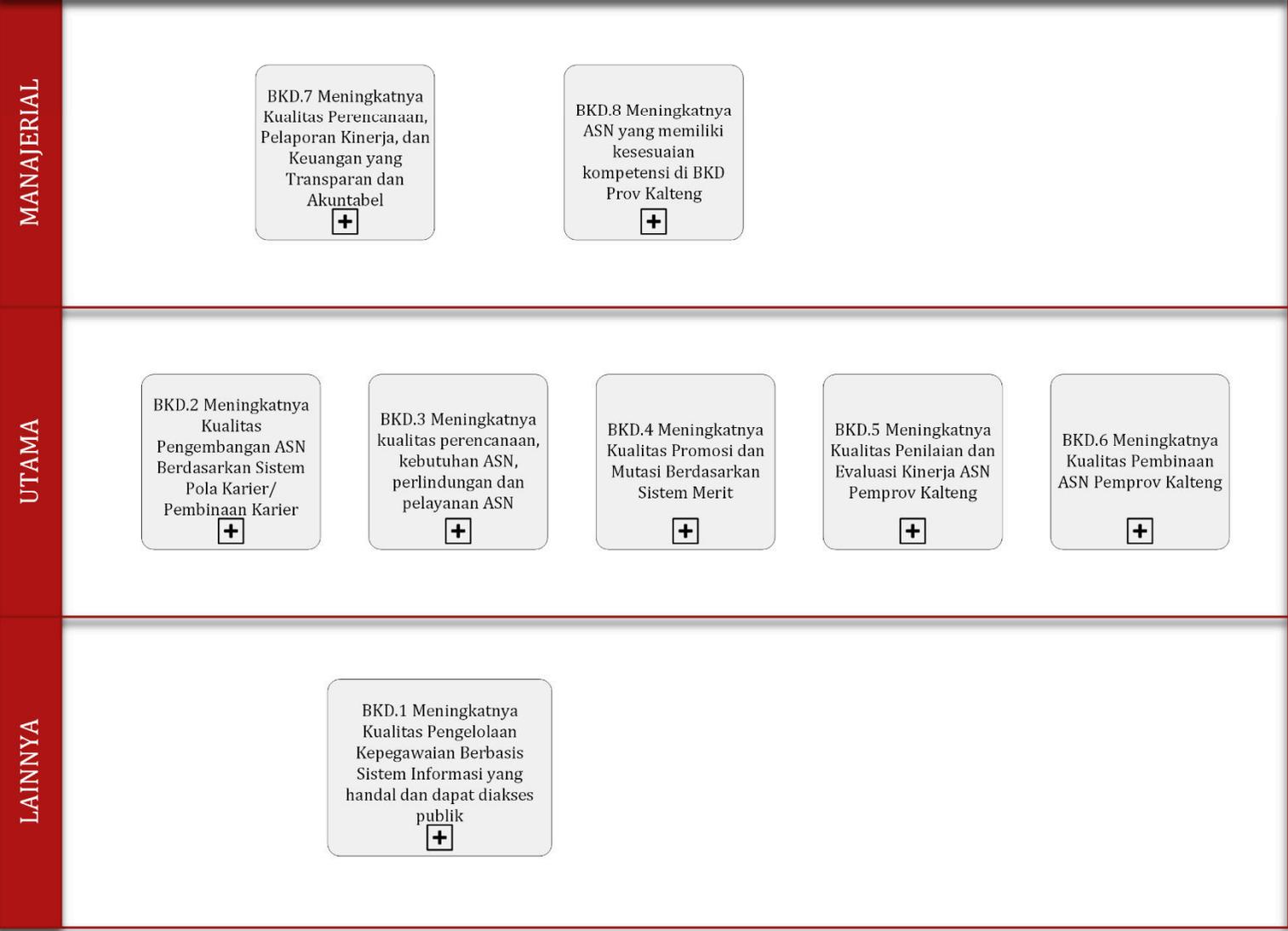
Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Peta Proses Bisnis BKD Menggunakan Jenis Gambar Peta digambarkan sebagai berikut :

INPUT

OUTPUT

**PETA PROSES BISNIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- KEMENTERIAN PAN RB
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- SKPD PEMPROV KALTENG
- BPSDM PROVINSI
- BKPSDM KAB/KOTA



ASN SE KALTENG

BAB III PENUTUP

Dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan apa yang hendak dicapai; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, dan program Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud.

Selain itu, Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini juga sekaligus menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit satuan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.

Oleh karenanya dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun hendaknya selalu diarahkan pada upaya pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya masyarakat dan pemerintah, serta percepatan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategis untuk menciptakan "kondisi antara" menuju sistem manajemen yang diinginkan, seperti : mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang ada, memberdayakan instrumen/infrastruktur manajemen kepegawaian (menyesuaikan peraturan perundang-undangan kepegawaian dan dengan mengantisipasi kondisi kedepan), mengembangkan sistem informasi dan database kepegawaian dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap agar mampu mendukung pencapaian cita-cita yang diharapkan.

Meskipun disadari bahwa terwujudnya reformasi birokrasi Kalimantan Tengah yang profesional bukan merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah, namun demikian mengingat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran dalam mengemban amanat Gubernur Kalimantan Tengah, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya dalam

langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang pelayanan manajemen kepegawaian daerah dan diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkembang dinamis seiring perubahan lingkungan dan tuntutan perubahan paradigma menuju perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga dengan dokumen Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, semua perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan dan harapan pegawai.

Palangka Raya, 14 Juli 2022



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA ARRİYANA, S.Sos

Perwakilan Utama Muda

NIP. 19680901 198911 2 005